

Peluang Ekspor Udang Semakin Terbuka

PURWOREJO (KR) - Peluang ekspor udang vanamei dari Kabupaten Purworejo dalam bentuk produk segar, semakin terbuka. Keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) mendekatkan sentra budidaya tambak di pesisir Purworejo dengan negara-negara di berbagai belahan dunia. Jarak dinilai tidak lagi menjadi kendala karena adanya akses transportasi internasional lewat udara itu. "Hal yang membedakan Purworejo sekarang dan dahulu adalah adanya deru suara pesawat. Maknanya adalah kita sudah semakin dekat dengan dunia luar, yang artinya peluang pasar udang vanamei Purworejo tentu bertambah luas," tutur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Purworejo Bambang Jati Asmara, saat berdiskusi dengan petambak udang di Desa Jatikontal Kecamatan Purwodadi, Sabtu (18/10).

Dalam dialog Kemitraan Multi Pihak, Tambak Udang Rakyat Menggerakkan Ekonomi Jawa Tengah yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Pemkab Purworejo itu, Bambang Jati mengungkapkan jika keberadaan bandara sangat bisa dimanfaatkan pelaku budidaya untuk memperluasjangkauan pasar ekspor. Mereka, lanjutnya, tinggal meningkatkan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempromosikan produk. **(Jas)**

Operasi Yustisi Cukup Efektif

GROBOGAN (KR) - Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus korona, dilakukan dengan operasi yustisi. Pasalnya, masyarakat yang terjaring operasi dan mendapat sanksi selalu ingat sehingga akan berubah perilakunya. "Operasi yustisi cukup efektif sebagai salah satu mencegah penyebaran dan menularan virus korona. Sehingga diharapkan masyarakat menjadi lebih disiplin menjalankan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak," kata anggota DPRD Jateng Padmasari Mestikajati, saat mengikuti operasi yustisi pen-disiplinan pelaksanaan protokol kesehatan cegah Covid-19 di Toroh Grobogan, Senin (19/10).

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan Pemprof bersama DPRD Provinsi Jateng akan terus berusaha menurunkan angka Covid-19. Selain melakukan penyuluhan dengan cara turun langsung ke bawah, juga ikut bergabung dengan instansi terkait melakukan operasi yustisi. **(Tas)**



KR-M Taslim

Sejumlah pelanggar protokol kesehatan di Grobogan tengah mendapat sanksi sosial membersihkan jalan.

Deklarasi Forkopimda Klaten Tolak Demo Anarkis

KLATEN (KR) - Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Klaten, perwakilan mahasiswa dan ormas, menggelar deklarasi menolak demo anarkis. Deklarasi berlangsung di Monumen Juang 45, Kompleks GOR Gelarsena, Klaten, Senin (19/10). Deklarasi menolak unjuk rasa anarkis dibacakan oleh Ketua DPRD Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Isi deklarasi antara terkait adanya aksi-aksi unjuk rasa yang anarkis di beberapa wilayah Indonesia, Forkopimda Kabupaten Klaten bersama unsur FKUB, MUI, BEM Klaten, Serikat Pekerja, Ormas Islam, Tokoh Pemuda, dan Ormas Kabupaten Klaten menyatakan menolak unjuk rasa anarkis, dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.



KR-Sri Warsi

Deklarasi tolak demo anarkis, di Monumen Juang Klaten.

Selain itu, menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Klaten. Melaksanakan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Tidak terpengaruh dengan berita-berita hoaks yang memprovokasi, serta mendukung Polri dan TNI

menindak pelaku kerusuhan/ anarkis dalam unjuk rasa.

Kapolres Klaten AKBP Edy Suranta Sitepu mengemukakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk

menjaga dan menciptakan kondisi Klaten yang kondusif, aman dan damai. Sejauh ini tidak ada demo-anarkis di Klaten. Masyarakat diharapkan menyalurkan aspirasi mereka melalui DPRD. "Kami duduk bersama

dengan beberapa elemen masyarakat. Jangan sampai di Klaten ada demo anarkis seperti di daerah lain. Kalau sampai fasilitas umum dirusak nanti rakyat juga yang rugi, karena fasilitas dibangun dengan uang rakyat. Lebih balik aspirasi disampaikan secara damai," kata Kapolres.

Hal senada juga disampaikan Pjs Bupati Klaten Sujarwanto. Ia menegaskan, di Klaten tidak ada kerawanan. Jika ada aspirasi dari masyarakat semua akan diapresiasi.

"Jika keputusan ada di tangan pemerintah kabupaten, maka aspirasi pasti akan dipertimbangkan. Namun, jika keputusan ada di pemerintah pusat, maka aspirasi tersebut akan disampaikan ke pusat untuk menjadi pertimbangan pengambilan keputusan," kata Sujarwanto. **(Sit)**

Destinasi Wisata Harus Perhatikan Prokes

MAGELANG (KR) - Daya Tarik Wisata (DTW) di wilayah Kabupaten Magelang yang mendapat izin dari Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Covid 19 Kabupaten Magelang hingga Minggu (18/10), tercatat 55 DTW. Dari jumlah itu ada yang berupa Balai Ekonomi Desa (Balkondes), Desa Wisata dan Wisata Desa, Candi, wisata religi, wisata alam dan wisata buatan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sekaligus Plt Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, Iwan Sutiarso, Minggu (18/10) mengemukakan DTW di Kabupaten Magelang ada

sekitar 210. Sebelumnya yang sudah diizinkan buka 52 DTW, sekarang menjadi 55 DTW. Kemungkinan penambahannya sedikit. Diusahakan yang sudah diizinkan buka benar-benar sudah matang dan siap, meskipun ada kerawanan-kerawanan yang

harus diantisipasi.

Berkaitan dengan perkembangan pengunjung, kata Iwan, dari waktu-waktu relatif ada kenaikan. Selalu ditekankan bahwa destinasi yang sudah buka tersebut juga benar-benar harus siap, di antaranya dari segi pro-

tokol kesehatan, dengan harapan ekonomi tetap dapat berjalan dengan produktif dan aman dari Covid-19. Ini memerlukan komitmen semua pihak, termasuk masyarakat yang akan berwisata. Mereka yang akan berwisata adalah mereka yang memang siap untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Mulai Senin (19/10) kegiatan wisata Dusun Butuh 'Nepal Van Java' Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, tepatnya

yang ada di kawasan lereng Gunung Sumbing Magelang akan dilakukan penutupan sementara. Hal ini juga dibenarkan Iwan Sutiarso, Camat Kaliangkrik Daryoko Umar Singgih SIP MM dan Kepala Dusun Butuh Lilik Setyawan kepada KR secara terpisah. Pengelola Wisata Dusun Butuh "Nepal Van Java" juga sudah mengeluarkan Surat Edarannya berkaitan dengan rencana penutupan sementara hingga waktu yang belum ditentukan tersebut. **(Tha)**

Jalur Diperpanjang Hingga 96,574 km

DESEMBER TOL SOLO JOGJA DIMULAI



PEMERINTAH segera akan memulai pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta sepanjang 96,574 km pada Desember mendatang. Proyek dengan anggaran Rp 26,637 triliun tersebut bakal melintasi tujuh kabupaten di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso kepada KR di Semarang Senin (19/10). Pemegang konsesi Pengelola jalan tol Solo-Yogyakarta adalah PT Jogjasolo Marga Makmur, yang sudah melakukan kontrak pengelolaan pada 9 September 2020 lalu dengan lama masa konsesi 40 tahun. Proyek sepanjang 96,574 km tersebut akan melewati Karanganyar, Boyolali, Klaten, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dengan exit terakhir di perbatasan Purworejo. Hadi mengatakan proyek yang menghabiskan anggaran Rp 26,637 Triliun tersebut merupakan kelanjutan pembangunan interkoneksi jalan Tol Trans Jawa yang akan diselesaikan sampai dengan tahun 2024 yang akan datang.

"Alhamdulillah, jalan tol ini akan segera dilaksanakan. Meski namanya Tol Solo-Yogya, namun jika dilihat dari rencananya tidak ada jalur yang melewati solo. Pembangunan akan dimulai dari Colomadu Karanganyar sampai di Kulonprogo, dan akan dilanjutkan sampai Purworejo. Komisi D DPRD Jawa Tengah berharap proyek tersebut akan berjalan dengan lancar," tutur Hadi Santoso.

Menurut Politisi PKS ini, rencana pembangunan tol Solo-Yogyakarta proses penentuan lokasi sudah selesai untuk jawa tengah dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur No 590/38 tahun 2020. Sedangkan untuk DIY dengan keputusan Gubernur DIY No 206/KEP/2020. Luas lahan yang akan digunakan di Jawa Tengah seluas 4.721.551 meter persegi, sedangkan di Yogyakarta seluas 4.269.941 meter persegi. Bahkan untuk Jawa Tengah izin Analisa



KR-Budiono

Hadi Santoso (nomor 2 dari kanan), saat melakukan sosialisasi rencana pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta.

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sudah keluar juga.

Menurut Hadi Santoso, pembangunan proyek jalan tol Solo-Yogyakarta akan terbagi menjadi tiga seksi, yaitu seksi satu untuk jalur Kartosuro - Purwomartani sepanjang 42,37 km, seksi dua Purwomartani - Gamping sepanjang 23,42 km, dan seksi tiga Gamping - Purworejo sepanjang 30,77 km dengan dilengkapi sembilan pintu tol, yaitu di Kartosuro, Karangnom, Klaten, Prambanan, Purwomartani, Gamping, Sentolo, Wates, NYIA Kulonprogo, dan Purworejo. "Secara teknis pembangunannya akan dilakukan bertahap. Desember ini akan dimulai pembangunan seksi I dari Ngasem Colomadu sampai dengan Purwomartani Sleman," tutur Hadi Santoso.

Menurut Politisi asal wonogiri ini, kebutuhan lahan yang diperlukan sebesar 11.329.664 meter persegi dengan membebaskan 13.102 bidang tanah, yang tersebar di 25 Kecamatan. Penggunaan lahan terbesar ada di pembangunan sesi satu sebanyak 6.766 bidang

tanah, dan saat ini sudah berjalan sesuai rencana. Tahap sosialisasi lokasi dan proses pengukuran sudah dilaksanakan.

Hadi menambahkan, Proyek ini termasuk salah satu proyek strategis nasional yang terdapat dalam PERPRES No 58 tahun 2017, yang diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Tengah dan DIY. "Mengingat strategisnya proyek ini, yang tadinya panjangnya hanya 40,5 km, oleh pemerintah diperpanjang menjadi 97 km, sampai melewati Yogyakarta Internasional Airport," kata Hadi Santoso.

Hadi mengatakan tol Solo-Yogyakarta tersebut memiliki fungsi strategis disektor ekonomi khususnya pariwisata dan perdagangan, karena terhubung dengan kawasan super strategis Borobudur, Yogyakarta, Prambanan dan Surakarta. Jalan tol ini rencana akan menghubungkan tiga Bandara, ratusan kawasan wisata, juga mengintegrasikan sistem jaringan jalan tol trans Jawa dengan jalan selatan-selatan dan juga kawasan

bangkitan ekonomi baru yang memiliki nilai sangat strategis. Untuk itu proyek ini membutuhkan dukungan dari berbagai kalangan.

Menurut Hadi Santoso dari Fraksi PKS ini, tol Solo-Yogyakarta juga akan menjadi embrio penyelesaian sistem jaringan jalan jawa bagian selatan. Dalam perkembangannya nanti juga diharapkan bisa tersambung dengan Banjarnegara - Cilacap-Purwokerto. Jika rencana tersebut bisa direalisasikan, akan mempersingkat jarak tempuh dan menurunkan biaya transportasi dan distribusi logistik.

Mengingat pentingnya keberadaan jalan tol Solo-Yogyakarta ini, Hadi berharap semua proses dan tahapan pembangunan ini tetap harus melibatkan masyarakat dan tidak ada pihak yang dirugikan, serta tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan dan stabilitas pangan.

Menurut Hadi, lahan yang dilewati sebagian besar adalah kawasan padat penduduk, serta lahan pertanian produktif. Dengan realita tersebut Hadi berharap

jangan sampai masyarakat yang terdampak merasa dirugikan dan mengganggu tata guna air persawahan yang terlewati. Untuk itu keberadaan AMDAL sangat penting untuk dipatuhi dan juga berharap AMDAL untuk kawasan DIY juga segera keluar agar semua menjadi lebih tenang.

Hadi juga berharap proyek yang menghabiskan anggaran puluhan triliun rupiah tersebut mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Tengah khususnya di daerah tengah. "Ada tujuh kabupaten yang terlintasi, yakni Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dengan exit terakhir di perbatasan Purworejo. Ini akan menghubungkan tol trans Jawa dan juga tiga bandara internasional, sehingga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi," tegas Hadi.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo minta kepada warga yang tanah dan bangunannya dilewati proyek pembangunan jalan tol Solo-Yogya, agar tidak melakukan transaksi jual beli atau pengalihan kepemilikan tanah kepada spe-



KR-Budiono

Hadi Santoso

kulan. Ganjar mengatakan telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Nomor 590/48 tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan tol Solo-Yogyakarta.

Didampingi Kabid Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Endro Hudiyo, Ganjar mengatakan sesuai SK Penlok tertanggal 15 September 2020, pengadaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta diharapkan bisa berjalan dengan lancar.

Gubernur minta warga turut membantu proses kelancaran pengadaan tanah. Hal itu dapat dilakukan dengan menandai batas tanahnya masing-masing, dan memberikan datanya kepada petugas terkait. Gubernur berharap warga yang tanahnya dilewati jalan tol tidak tergiur dengan tawaran oknum spekulasi tanah dengan iming-iming dibeli harga tinggi.

Endro Hudiyo juga minta kepada masyarakat jangan memberi peluang kepada para spekulasi tanah yang saat ini banyak bergentayangan, meski dengan iming-iming akan membeli dengan harga mahal.

"Kami minta agar masyarakat yang tanah dan bangunannya akan terkena proyek jalan tol Solo-Yogyakarta untuk menyiapkan administrasi terkait kepemilikan tanah dan bangunan, yaitu salinan sertifikat tanah, kutipan letter C dari desa atau kelurahan, dan dokumen administrasi kependudukan berupa KTP serta KK. Kami minta saat pengukuran nanti warga harus hadir untuk mendampingi petugas BPN untuk menunjukkan batas tanah milik mereka," tutur Endro. **(Adv/Budiono)**